



EFISIENSI PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN FASILITAS PUBLIK DI JAWA TIMUR

Ratna Indah Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Prodi Ilmu Ekonomi,
ratnaindah257@gmail.com, UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

The purpose of this paper is to find out, provide an overview and analyze the allocation of local government budgets used for development, management, and public development in East Java Province. Each region will need facilities that can be used by the community, facilities that facilitate people's lives provided directly by the local government. The analytical method used is descriptive qualitative using secondary data with literature or literature study techniques. The results of this study indicate the influence of the large government budget for the development and construction of public infrastructure in East Java. One of the allocations from local government spending is realized for the development and construction of public infrastructure facilities that can be enjoyed by the community. In terms of infrastructure development, the regional government must also determine which location will be built, infrastructure development should not be carried out in irrigated rice fields because it will result in damage to the food fields of the surrounding community.

Keywords: Budget; Development ; Development ; Regional government; East Java.

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui, memberikan gambaran serta menganalisis pengalokasian anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pengembangan, pengelolaan, serta pembangunan publik di Provinsi Jawa Timur. Tiap daerah akan memerlukan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat, fasilitas yang memudahkan kehidupan masyarakat yang disediakan langsung oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif menggunakan data sekunder dengan teknik studi pustaka atau literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh besarnya anggaran pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur publik yang ada di Jawa Timur. Salah satu alokasi dari belanja pemerintah daerah direalisasikan untuk pengembangan dan pembangunan sarana prasarana publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah daerah juga harus menentukan lokasi mana yang akan dibangun, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan di lahan sawah irigasi karena akan berakibat pada rusaknya lahan pangan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Anggaran ; Pengembangan ; Pembangunan ; Pemerintah Daerah; Jawa Timur.

1. PENDAHULUAN

Mungkin dari masyarakat tidak menyadari bahwa dari aktifitas yang mereka lakukan tentunya memerlukan infrastruktur serta barang umum yang disebutnya barang publik. Barang publik dapat digunakan oleh semua orang tanpa menghilangkan manfaat saat individu lain juga mengkonsumsinya. Menurut (Wicaksono 2012), barang publik adalah barang yang dapat dibagikan dan tersedia untuk semua orang dan sifatnya non eksklusif. Barang publik dapat digunakan untuk pengukuran kesejahteraan suatu negara, unsur yang mengatakan sebuah daerah mampu tidak membangun daerahnya dengan baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangan daerahnya serta unsur pendukung adanya pembangunan juga dapat dilihat dari mampu tidaknya pemerintah untuk mengadakan program – program pembangunan publik yang dapat digunakan khalayak banyak.

Negara tidak cukup menjadi pengatur dan pengelola fasilitas publik, dengan adanya hal ini maka akan memberikan ruang luas bagi pasar. Dalam hal ini yang patut dipertanyakan juga oleh publik yakni apakah anggaran pemerintah daerah sudah dialokasikan secara maksimal untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur publik. Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem pembangunan desentralistik dimana pemerintah daerah diberi kewenangan besar dalam mengelolah pembangunan daerah (kekayaan dan keuangan daerah). Menurut Halim&Mujib (2009) dalam (Sianturi 2014) desentralisasi merupakan pemberian wewenang dan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengelolah segala sumber daya yang ada di suatu daerah, salah satunya dalam mengatur bentuk keuangan daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah juga menyampaikan jumlah biaya belanja pemerintah daerah Jawa Timur tahun anggaran 2020 sebesar Rp 32,286 Triliun atau 93,41 persen. Sebagian besar anggaran belanja pemerintah daerah Jawa Timur dialokasikan untuk penanganan virus Covid – 19. Dimana pada tahun 2020 negara Indonesia terkena wabah dari Covid-19, yang mengharuskan warganya untuk tetap dirumah untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Adanya permasalahan ini membuat perekonomian Indonesia tidak stabil, dimana pendapatan daerah semakin menurun disebabkan pembatasan wilayah yang membuat proses distribusi barang terhenti. Negara banyak mengeluarkan anggaran untuk digunakan sebagai penanganan Covid-19, seperti dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berdampak. Pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai dan bahan pokok kepada masyarakat agar terus melanjutkan kehidupannya. Sebab saat terjadinya Covid masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar, bahkan ada PHK besar-besaran disejumlah perusahaan. Sebagai tolak ukur pemasukan daerah, apabila nilai pendapatan asli daerah dapat memenuhi atau melebihi target, maka belanja pemerintah juga dapat

tercukupi atau bernilai positif. Dan sebaliknya apabila pendapatan tidak dapat memenuhi target maka belanja pemerintah akan bernilai negatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam memfasilitasi masyarakat, pemerintah tidak boleh membedakan, fasilitas harus diberikan secara merata. Contohnya seperti fasilitas umum yang diberikan kepada penyandang disabilitas, pemerintah tidak hanya fokus pada masyarakat yang hidup normal, namun fasilitas juga harus diberikan pada masyarakat yang memiliki keterbatasan, agar konsep adil dapat diterapkan. Pemerintah bertanggung jawab dan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam layanan publik yang nantinya akan mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan fasilitas umum, fasilitas sosial dan layanan publik lainnya. Dengan adanya pernyataan seperti ini, pemerintah mempunyai wewenang yang besar sebagai pengatur, pembuat kebijakan serta pengelola layanan publik. Dalam kajian ini akan memuat perspektif dari para ahli berupa teori – teori yang mendukung kepenulisan ini.

Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014 : 5) mengatakan, pelayanan yakni kegiatan yang dilakukan untuk seseorang dengan tujuan menuai kepuasan konsumen. Suparlan (2000 : 35) mengatakan pelayanan yakni usaha pemberian bantuan kepada orang lain, bantuan tersebut dapat berupa materi, tujuan pemberian bantuan kepada orang lain yakni supaya orang tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan sendirinya. Menurut Moenir (1992 : 16) pelayanan yakni proses yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Alokasi anggaran daerah, salah satunya digunakan untuk fasilitas yang dapat digunakan untuk masyarakat banyak. Fasilitas adalah sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya pembangunan dan pengembangan fasilitas umum ini nantinya dapat menjangkau kelangsungan hidup masyarakat, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, transportasi, air, olahraga dan peribadatan (Moeliono et al. 2010). Untuk mengatur serta mengelola anggaran belanja modal yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan serta pelayanan publik yakni dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk saat ini banyak dikelola oleh pemerintah daerah, sering terdengar dengan otonomi daerah. Menurut F. Sugeng Istanto, otonomi daerah merupakan suatu hak dan wewenang yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur rumah tangga daerah. Menurut (Aji Primanto 2020) wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintahan daerah bersangkutan. Menurut Widjaja, otonomi daerah yakni suatu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang mengatur negara secara menyeluruh, dengan upaya untuk mencapai tujuan pemerintahan serta cita-cita bangsa yang adil dan merata.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis dalam proses analisisnya. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan (Muhammad Ramdhan 2021). I Made Wibartha (2006:155) berpendapat, metode analisis kualitatif deskriptif yakni metode yang berisikan tentang analisis, gambaran serta ringkasan kondisi dan situasi tentang data dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif menggunakan data empiris dalam proses pemecahan masalah. Dalam penelitian ini data yang dijelaskan deskriptif tidak berupa angka atau perhitungan semacamnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder, dimana data tersebut diperoleh peneliti dari pihak atau lembaga lain yang relevan dengan penelitian ini. (McCaston:2005) Data sekunder adalah data yang terkumpul dari orang lain atau sudah pernah di dokumentasikan dan dipublikasikan oleh pihak lain dan kemudian dianalisis. Data sekunder yang digunakan dalam jurnal teoritis ini yakni data sekunder yang sifatnya kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur, Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari sumber lain yakni Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur terkait data PDRB dan data lainnya diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu komponen dari pelaksanaan program keuangan daerah yang menjadi kerangka penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah APBD dibagi menjadi dua jenis yakni manajemen penerimaan (pendapatan daerah) segala penerimaan berupa kekayaan yang masuk pada catatan keuangan daerah dan manajemen pengeluaran (belanja daerah) segala pengeluaran kekayaan yang masuk dalam catatan keuangan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD menyetujui langsung terkait instrumen implementasi dalam melaksanakan dan mengatur kebijakan keuangan daerah, kebijakan ini yang salah satunya akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah yang diatur. Berbagai sasaran program yang akan dicapai dilihat terlebih dahulu dari besar kecilnya jumlah pendanaanya. Program pemerintah daerah akan berjalan dengan lancar apabila sumber pendapatan daerah semakin tinggi. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No 13 Tahun 2006 menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja serta aspek pembiayaan. Dalam aspek pendapatan terdapat beberapa jenis seperti pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain pendapatan yang sah. Dari aspek belanja terdapat belanja

tidak langsung dan belanja langsung. Dan dalam aspek pembiayaan terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut penjelasan terkait tiga aspek dalam APBD.

Aspek Pendapatan Daerah

Dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah yakni hak pemerintah daerah yang diakui penambahan nilai dari kekayaan bersih yang diperoleh. Dalam komponen pendapatan daerah dibagi menjadi tiga yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian perkembangan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 1. Rata – Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 – 2020 dalam juta rupiah

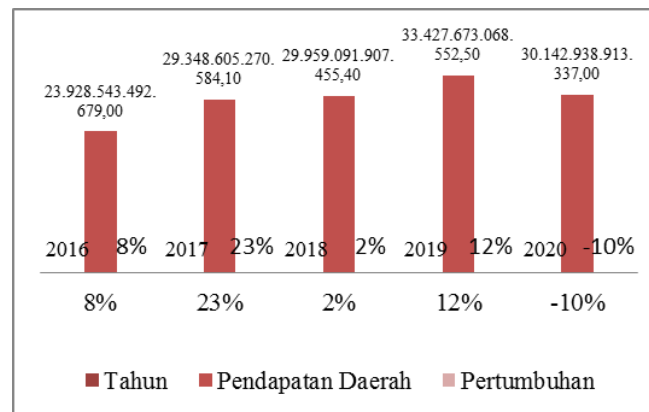
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata – rata Pertu mbuh an (%)
Pendapat an Daerah	23.928.543 .492.679,0 0	29.348.605 .270.584,1 9	29.959.09 1.907.455, 47	33.427.673 .068.552,5 5	30.142.9 38.913.3 37,00	7%
Pendapat an Asli Daerah	14.624.118 .008.516,0 0	15.850.715 .963.543,1 9	16.575.98 7.295.655, 47	18.212.437 .333.663,5 5	15.448.8 32.795.5 89,00	1%
Dana Perimban gan	9.237.037. 405.163,00	13.490.264 .307.041,0 0	13.270.91 1.941.800, 00	14.975.612 .355.889,0 0	14.494.7 74.440.6 37,00	
Lain – lain pendapat an daerah yang sah	67.388.079 .000,00	7.625.000. 000,00	112.192.6 70.000,00	239.623.37 9.000,00	199.331. 677.111, 00	

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Data Audit 2016 – 2019

Berdasarkan data selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 penurunan pendapatan daerah terdapat pada tahun 2020 sampai nilai presentase -10%. Penurunan ini diakibatkan adanya pandemi. Sebelumnya ditahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur meningkat cukup baik. Ditahun 2016 pendapatan daerah mencapai Rp 23,9 Triliyun lebih. Dari data diatas dapat diketahui bahwa sampai tahun 2019 menjadi Rp 33,4 Triliyun lebih dalam peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7%. Dapat diketahui bahwa perekonomian Indonesia pada 4 tahun terakhir mengalami kemajuan. Gambaran Peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

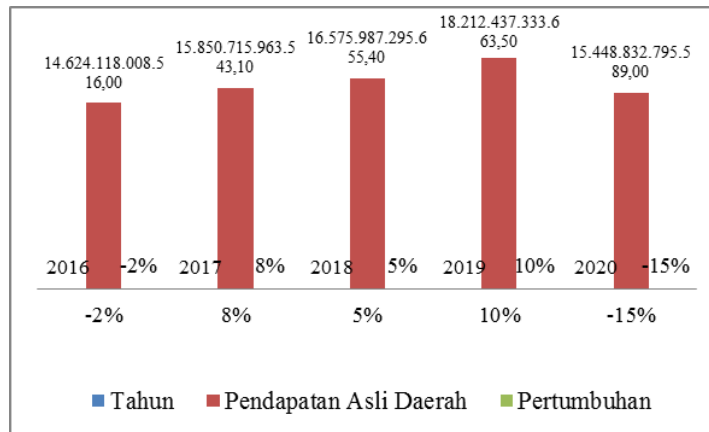
Gambar 1. Pendapatan Daerah Jawa Timur



Data : BPS diolah

Komponen utama yang ada pada pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Ditahun 2016 tingkat Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur mengalami penurunan dimana ditahun 2015 tingkat PAD mencapai Rp 14,9 Triliyun mengalami penurunan pada presentase 8% dalam jumlah Rp 14,6 Triliyun lebih. Setelah tahun 2016 tingkat PAD Provinsi Jawa Timur kembali mengalami peningkatan rata – rata 1% pertahun, dan ditahun 2019 puncaknya sebelum tingkat PAD menurun, tingkat PAD menjadi Rp 18,21 Triliyun lebih. Dapat terlihat pertumbuhan dari tahun 2017 samapai dengan tahun 2020 adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini nantinya akan berpengaruh pada pendapatan Provinsi Jawa Timur. Grafik pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah



Data : BPS diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih didominasi oleh sumbangan dari pajak daerah, tingkat sumbangan pajak tertinggi pada tahun 2019 senilai RP 14,8 Triliyun lebih. Dalam hal perolehan pendapatan daerah, pajak memiliki banak kontribusi. Karena penerimaan pajak juga menempati nilai tertinggi. Pajak Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 sampai dengan 2019 pertumbuhannya signifikan. Penurunan pajak terdapat pada tahun 2020 karena akibat adanya virus Covid – 19.

Dalam pengelompokannya, belanja pemerintah dibagi menjadi dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yakni belanja yang dikaitkan langsung oleh pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa. Sedangkan belanja tidak langsung yakni belanja yang tidak langsung dikaitkan oleh pemerintah daerah seperti belanja yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Rincian perkembangan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 2. Rata – Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 – 2020 dalam juta rupiah

uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja daerah	24.616.511.471.689,00	30.937.109.134.349,56	33.245.888.781.196,70	38.004.721.350.292,36	34.565.028.403.219,39
Belanja Langsung	7.769.208.603.560,11	10.276.131.514.293,08	10.974.635.156.314,07	11.942.455.008.358,14	10.062.757.808.062,80

Belanja	16.847.302.8	20.660.977.6	22.271.253.	26.062.266.	24.502.270.5
Tidak	68.128,89	20.056,48	624.882,63	341.934,22	95.156,59
Langsun g					

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Data Audit 2016 – 2019

Dapat diketahui melalui tabel diatas bawa tiap tahunnya realisasi belanja langsung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Penurunan realisasi belanja langsung dapat terlihat pada tahun 2020, karena pada taun 2020 pendapata daerah melebihi target yang sudah ditentukan. Seperti halnya terlihat belanja tidak langsung yang juga mengalami kenaikan tiap tahunnya, dan mengalami penrununan seperti belanja langsung sama – sama ditaun 2020.

Percepatan pembangunan ekonomi diatur dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019. Pelaksanaan pembangunan dilakukan diwilayah Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan lintas wilayah selatan Jatim. Untuk pembangunan ini disediakan anggaran sebesar ; 8,9 Triliun untuk pembangunan infrastruktur mencakup 4,27 Triliun untuk sumber daya air, 1,41 Triliun diperuntukan pemukiman, 2,65 Triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan dan 0,57 Triliun untuk kawasan perumahan (Biro Komunikasi 2021). Terdapat 5 rencana yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi Jatim yakni :

1. Penangan banjir dikawasan Kali Lamong dan Bengawan Solo, penangan ini berupa pembangunan *Jabung Ring Dike*, peningkatan kapasitas tampung *floodway* di wilayah Lamongan, pengendalian banjir di area Sungai Bengawan Solo hilar ke arah Sungai Tuban, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini bertujuan untuk pengendalian banjir di Sungai Bengawan Solo juga sebagai kesatuan tiga bendungan yang sudah ada yakni Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat dan Bendung Gerak Sembayat tujuan lain dari pembangunan Bendung ini yakni untuk pengembangan infrastruktur irigasi yang mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air baku. Selanjutnya yakni pembangunan tanggul dan normalisasi sungai jeroan.
2. Pembangunan jalan tol arah Kertosono – Kediri, Kediri – Tulungagung, Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Gresik dan tol arah Malang – Kepanjen. Demikian dilakukan pembangunan diarah jalan tol tersebut sebab jalur ini sangat strategis menghubungkan jalur arah utara, tengah, dan selatan juga ujung timur Banyuwangi.
3. Pengembangan infrastruktur disisi selatan jawa timur pada wilayah jalan Selingkar Wilis dan Pantai Selatan, adanya pengembangan infrastruktur

diarea ini untuk mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah tersebut, tenaga kerja maupun teknologi lokal guna menambah pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan yang ada juga menumbuhkan kemandirian. Tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan yang nantinya akan dibangun jalan sepanjang 235,524 km yang akan melewati enam Kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Pemerintah daerah Jawa Timur melalui Menteri Kelautan dan Perikanan juga akan melaksanakan program pengelolaan pelabuhan perikanan yang ada.

4. Pembangunan infrastruktur yang akan digerakkan di perairan Keagen – Madura yang berada di Desa Kalisangka, pembangunan ini berupa *sea plane (waterbase airport)*, transportasi air yang digunakan untuk melalui kepulauan yang tidak jauh dari perairan lain. Pembangunan infrastruktur ini nantinya akan berperan penting bagi masyarakat, dengan adanya pembangunan infrastruktur baru di perairan Keagen – Madura ini akan menjadi capaian bagi pertumbuhan ekonomi baru di pulau – pulau kecil sekitar area pulau Madura.
5. Pengembangan infrastruktur yang berada di Kawasan Industri Nganjuk (KING). Kawasan Industri Nganjuk ini akan menjadi pusat industri yang memiliki sarana, prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang memprioritaskan kawasan lingkungan yang nantinya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari serangkaian proses analisis dari mulai awal pengumpulan data – data pendukung, informasi, penyusunan latar belakang sampai dengan hasil dan pembahasan jurnal dijelaskan melalui metode kualitatif deskriptif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jawa Timur adalah Provinsi yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi, dari tahun ketahun pendapatan Jawa Timur mengalami kenaikan. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat permasalahan global yakni covid – 19. Realisasi belanja pemerintah tiap tahunnya juga mengalami peningkatan, namun belanja daerah diimbangi dengan pendapatan daerah yang telah melalui target yang sudah ditentukan oleh pemerintah Daerah Jawa Timur.
- b. Dalam penulisan ini dibahas terkait salah satu realisasi belanja pemerintah digunakan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur publik di sejumlah wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah selatan Jawa Timur. Upaya pemerintah daerah terus melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Dengan memaksimalkan alokasi anggaran belanja pemerintah

untuk keperluan publik akan meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah Jawa Timur.

- c. Dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah daerah juga harus menentukan lokasi mana yang akan dibangun, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan di lahan sawah irigasi, apabila pembangunan ditempatkan dilahan sawah dampaknya akan merusak lahan pangan bagi masyarakat sekitar.
- d. Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dengan membangun akses yang mempermudah jalur antar kota, pemerintah provinsi Jawa Timur juga membangun fasilitas publik dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kelayakan hidup dan mampu bersaing dipasar tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Primanto. 2020. *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. edited by Deddy Pandji Santoso. Malang: Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Andhika, Lesmana Rian. 2017. "Public Goods Bukankah Untuk Rakyat?" *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 8(1):41. doi: 10.22212/jekp.v8i1.697.
- Biro Komunikasi. 2021. "Menko Luhut: Pembangunan Infrastruktur Di Jawa Timur Disinergikan Dengan Program Strategis Nasional."
- Husain Umar. 2003. *BUSINNES AN INTRODUCTION*. kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikkip. 2020. "Juni 2020." *Kma - Klinik Management Aktuell* 25(06):4–5. doi: 10.1055/s-0040-1713493.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI(1):1–18.
- Moeliono, Limberg, Minnigh, Mulyana, Indriatmoko, Utomo, Saparuddin Hamzah Iwan, and Purwanto. 2010. *MeretasKebuntuan: Konsep Dan Panduan Pengembangan Zona Khusus Bagi Taman Nasional Di Indonesia*. Bogor Barat: Cifor.
- Muhammad Ramdhan. 2021. *METODE PENELITIAN*. edited by Aidil Amin Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Riyanto, Agus. 2012. "Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010." *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 12(2):1–14.
- Sianturi, Anastasia. 2014. "Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2(3):557–63.